

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN
BATALYON ARHANUDSE-6/BAY DALAM RANGKA
PENCAPAIAN TUGAS POKOK**

**IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT FORCE POLICY OF 6TH
ADA BATTALION IN ORDER TO ACHIEVE MAIN TASK**

Agus Nur Fujianto¹
Efendi Sihole²
Freddy Johanis Rumambi³

Prodi SPD Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(agusnf252@gmail.com)

Abstrak - Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 6/BAY merupakan Satuan Bantuan Tempur di bawah komando Resimen Arhanud-1/Faletehan, Kodam Jaya yang bertugas pokok untuk melaksanakan perlindungan udara secara aktif terhadap obyek vital yang telah ditetapkan. Satuan memiliki intensitas tinggi dalam pelaksanaan tugas dan dinamika kegiatan operasional. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY dalam rangka pencapaian tugas pokok. Tujuan penelitian, untuk: pertama, menganalisis implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY; kedua, menganalisis hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, analisis data menggunakan analisis domain. Lokasi penelitian di wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6 / BAY dalam rangka tugas pokok belum optimal digunakan sesuai dengan fungsi pertahanan udara, baik dalam rangka OMP maupun OMSP; 2) hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, strategi militer, penggunaan kekuatan.

Abstract - *The 6th Air Defense Artillery Battalion is a Combat Aid Unit under the command of the 1st ADA Regiment / Faletehan, Kodam Jaya whose main duty is to carry out active air protection against established vital objects. Unit has a high intensity in*

¹Agus Nur Fujianto adalah Penulis 1 dan mahasiswa Program Studi Magister Strategi PertahananDarat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

²Brigjen TNI Efendi Sihole, S.I.P., M.Si (Han) adalah Penulis 2 dan Dosen Pembimbing I.

³Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy Johanis Rumambi, M.M adalah Penulis 3 dan Dosen Pembimbing II.

the implementation of tasks and dynamics of operational activities. This study was designed to gain an understanding of implementation of force employment policy of 6th ADA Battalion in order to achieve main task. Research purposes, to: first, analyzing implementation of force employment policy of 6th ADA Battalion; second analyzing influential things of implementation of policy force employment of 6th ADA Battalion in order to achieve main task. This study uses qualitative methods. The data obtained through observation, interviews and literature study. More data analysis techniques performed in conjunction with the data collection when the researcher was in the field, data analysis using domain analysis. Research sites in the city of Jakarta. The results showed: 1) implementation of force employment policy of 6th ADA Battalion in order to achieve main task has not been optimally used in accordance with air defense functions OOW and OOTW; 2) influential things of implementation of force employment policy of 6th ADA Battalion in order to achieve main task in terms of several dimensions like communication dimension, resource dimension, disposition dimension and bureaucratic structure dimension.

Key Words: Policy implementation, military strategy, force employment

PENDAHULUAN

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Upaya pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen

utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman serta didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa⁴.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu Institusi Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menghadapi berbagai ancaman terhadap Kepentingan

⁴Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta : Kemenhan, 2015) h.51

Nasional. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam rumusan Tugas Pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan ikut serta dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan mandat PBB⁵. Tugas Pokok TNI ini merupakan penjabaran dari tugas negara atau tugas pemerintah yang diamanatkan di dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

TNI AD sebagai bagian dari TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat dimana dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI AD sebagai kekuatan pertahanan matra darat melaksanakan tugas-tugas TNI dilakukan dengan OMP maupun OMSP dalam rangka menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Guna mewujudkan hal tersebut, TNI AD bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain,

melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat⁶.

Arhanud TNI AD merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AD yang menyelenggarakan pertahanan udara aktif untuk menghancurkan, meniadakan atau mengurangi daya guna dan hasil guna segala bentuk ancaman udara musuh dengan menggunakan meriam dan peluru kendali darat udara dalam rangka pertahanan udara di medan operasi maupun pertahanan udara nasional. Gelar satuan Arhanud di TNI AD merupakan wujud penggunaan kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung pola operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Penggunaan kekuatan Arhanud TNI AD pada operasi militer perang terdiri dari dua pola tujuan operasi, yaitu dalam rangka operasi hanudnas maupun dalam rangka pertahanan udara di medan operasi.

Salah satu satuan Arhanud yang berada di wilayah Kodam Jaya ialah

⁵Undang Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁶Mabesad. *Doktrin TNI Angkatan Darat "Kartika Eka Paksi"*. (Jakarta: TNI AD, 2013) h.1

Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 6/Bhaladika Akasa Yudha. Batalyon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya memiliki tugas pokok untuk melaksanakan perlindungan udara secara aktif terhadap obyek-obyek Vital meliputi SKSD Palapa/SPUS Telkom Cibinong, Stasiun RRI Cimanggis, Pertamina Plumpang dan Pelabuhan Tanjung Priok yang dipertanggungjawabkan dari serangan udara musuh.

Fenomena pada masa damai, Batalyon Arhanudse-6/BAY banyak sekali melaksanakan kegiatan operasional tugas-tugas penggunaan kekuatan khususnya dalam rangka Operasi Militer Selain Perang. Penggunaan kekuatan Yonarhanudse-6/BAY justru banyak di luar tugas pokok Arhanud. Sebagai pelindung udara Ibukota Jakarta, satuan Yonarhanudse-6/BAY dikhawatirkan tidak mampu untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan dengan baik.

Dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang implementasi kebijakan penggunaan kekuatan di Yonarhanudse-6/BAY. Berdasarkan fenomena yang ada, penulis menentukan rumusan masalah yaitu

“Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY dalam rangka pencapaian tugas pokok satuan?” dan “Apa hal-hal yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY dalam rangka pencapaian tugas pokok satuan.

Peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain Implementasi kebijakan, Teori Strategi Militer, Teori Tugas dan pengertian penggunaan kekuatan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.⁷

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau

⁷Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan*. (Jakarta : Media Pressindo, 2005) h.101

turunan dari kebijakan publik tersebut.⁸

Disamping itu, Liddell Hart (1895-1896) mengatakan bahwa strategi adalah seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijaksanaan politik.⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

Tentang tugas, Stone mengemukakan bahwa “*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).¹⁰ Dale Yoder juga menyampaikan, “*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*”. Tugas

digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian telah mengungkapkan data dan fakta di lapangan tentang implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Yonarhanudse-6/BAY dan hal-hal yang mempengaruhinya.

Sumber data yang diteliti berasal dari Batalyon Arhanudse-6/Bhaladika Akaca Yudha, Resimen Arhanud-1/Faletehan, dan Kodam Jaya/Jayakarta. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi participant, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

Dalam melaksanakan penelitian memanfaatkan produk yang relevan dari peneliti yang terdahulu dan referensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Beberapa produk bidang Staf operasi yang dibuat oleh Batalyon Arhanudse-6/BAY, Resimen Arhanud-1/Faletehan dan Staf Ops Kodam

⁸Riant Nugroho Dwijowijoto. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004) h.158

⁹Seskoed. *Strategi Militer dalam Operasi*. (Bandung, 2017) h.7

¹⁰Drs Moekijat. *Perencanaan Sumber Daya Manusia* (Bandung : Mandar Maju, 1998) h.10

¹¹Dale Yoder. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung: Erlangga, 2001) h.9

Jaya/Jayakartamenjadi beberapa data tambahan yang telah dianalisa.

PEMBAHASAN

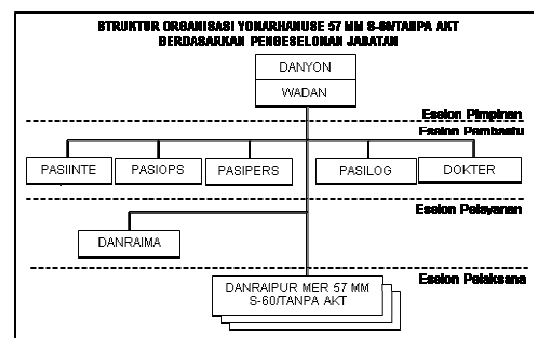
Sejarah Batalyon Arhanud-6/BAY.

Batalyon Arhanudse 6 dalam sejarah lahirnyapada 4 Desember 196merupakan perwujudan dari rencana pembangunan delapan tahun TNI Angkatan Darat dalam rangka pembangunan Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat. Pada awal pembentukan bernama “Batalyon Kuning” yang berkedudukan di Yosowilangun – Jawa Timur, namun pada tanggal 04 Pebruari 1963 dipindahkan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi organik Kodam V/Jaya dengan markas Batalyon berada di Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sejak berdiri pada tahun 1963, Batalyon Arhanudse 6/BAY telah melaksanakan tugas-tugas yang ditujukan dalam rangka operasi militer perang dengan menggunakan alat utama sistem senjata Meriam 57 MM S-60. Selain itu juga satuan dilibatkan dengan kegiatan penugasan-penugasan dalam rangka operasi keamanan dalam negeri tanpa menggunakan alutsista.

Sesuai Program Kerja Satuan tahun 2107, Batalyon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya bertugas pokok melaksanakan pertahanan udara secara aktif terhadap obyek-obyek Vital meliputi SKSD Palapa/SPUS Telkom Cibinong, Stasiun RRI Cimanggis, Pertamina Plumpang dan Pelabuhan Tanjung Priok yang dipertanggungjawabkan dari serangan udara musuh baik yang menggunakan pesawat terbang, peluru balistik maupun peluru kendali dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional.

Berdasarkan Orgas Yonarhanudse 57 MM S-60/Tanpa AKT Nomor Kep/8/XI/1998 tanggal 16 Nopember 1998, struktur organisasi Yonarhanudse-6/BAY disusun dalam pengeselonan jabatan meliputi eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.



Gambar 1. Struktur Organisasi Yonarhanudse-6/BAY

Sumber : Orgas Yonarhanudse 57 MM S-60/ Tanpa AKT, 1998

Implementasi Kebijakan Penggunaan Kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY

Penggunaan kekuatan pada hakikatnya merupakan elemen dari strategi militer. Strategi militer merupakan seni dan ilmu untuk membagi dan mengaplikasikan semua kekuatan militer untuk mencapai tujuan sebuah negara. Strategi ini memberikan arah untuk menggunakan kekerasan atau cara-cara persuasif dalam mencapai sasarannya



Gambar 2. Meriam 57 MM S-60/T.AKT
Sumber: Dokumentasi Yonarhanudse-6/BAY, 2017

Yonarhanudse-6/BAY merupakan merupakan satuan organik dan pelaksana Kodam Jaya yang berkedudukan langsung dibawah Resimen Arhanud-1/Faletehan yang dilengkapi dengan Alut Sista Meriam 57 mm S-60/ Tanpa AKT. Sebagai satuan bantuan tempur, Yonarhanudse-6 mampu melaksanakan tugas baik secara berdiri sendiri maupun dalam hubungan yang lebih besar.

Strategi penggunaan kekuatan dimaksudkan agar dapat mengetahui senjata atau kekuatan apa yang digunakan lawan, berapa jumlahnya dan dengan cara bagaimana lawan menggunakannya. Hal ini sesuai dengan teori Strategi Militer, Napoleon (1769-1821) mengatakan bahwa strategi adalah taktir besar bagaimana menggunakan suatu pasukan dalam suatu ruang dan waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam manuver strategi, pasukan digerakkan dari suatu daerah pangkalan atau medan tempur ke suatu medan tempur yang lain untuk memaksa musuh bertempur.

Kebijakan penggunaan Batalyon Arhanudse-6/BAY merupakan bagian integral dari penggunaan kekuatan Kodam Jaya yang merupakan Kotamaops dalam kerangka tugas negara, dimana dalam implementasinya ditujukan baik dalam rangka OMP maupun OMSP. Hal tersebut ditujukan agar penggunaan kekuatan satuan dapat proporsional dalam melaksanakan tugas baik pada OMP maupun OMSP.

Penggunaan Yonarhanudse-6/BAY dalam operasi militer pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi titik rawan suatu operasi

dan obyek vital nasional yang bersifat taktis dan strategis dari ancaman serangan udara musuh guna mendukung tercapainya tujuan operasi. Adapun penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini didasarkan kepada salah satu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi pada setiap jenis operasi yaitu masalah keunggulan udara.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Yonarhanudse-6/BAY dapat di BP/BKO kan untuk melaksanakan perlindungan udara terhadap Obvitnas dalam rangka Opshanud maupun titik rawan satuan operasi pada operasi dari segala bentuk ancaman udara musuh. Faktanya sejak terakhir pada tahun 1967, Yonarhanudse-6/BAY tidak pernah di BP/BKO kan kembali untuk melaksanakan perlindungan udara terhadap Obvitnas dalam rangka Opshanud maupun titik rawan satuan operasi pada operasi darat.

Dalam rangka OMP, penggunaan kekuatan satuan dilaksanakan untuk menghadapi agresi musuh dari luar negeri, yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk operasi tempur bersama dengan fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem operasi sesuai dengan

Sasaran dan tingkat eskalasi kemungkinan ancaman yang dihadapi. Pada pelaksanaannya dapat berupa operasi gabungan, operasi matra darat dan operasi bantuan.¹²

Sesuai dengan tugas pokok dalam rangka operasional pertahanan udara, pengerahan kekuatan satuan Yonarhanudse-6/BAY dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Kekuatan dikerahkan dalam bentuk organisasi secara utuh sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) satuan Arhanud dengan kekuatan minimal dalam hubungan satuan taktis terkecil yaitu Baterai Arhanud. Kedua, Yonarhanudse-6 merupakan unsur bantuan dari satuan yang dibantu dengan membentuk daerah Pertahanan Udara (Dahanud) dalam rangka pertahanan udara titik yang bersifat statis atau mobil sesuai dengan macam OMP yang dilaksanakan.

Dikaitkan dengan tugas pokok Yonarhanudse-6, pengerahan kekuatan belum memanfaatkan peran dan fungsi satuan Arhanud secara maksimal. Satuan Yonarhanudse-6 yang mempunyai alutsista meriam 57 MM S-60 tidak digunakan untuk tugas-

¹²Mabes TNI. *Buku Petunjuk Induk OMP*. (Jakarta: TNI AD, 2008) h.8

tugas dalam rangka pertahanan udara atau untuk mengantisipasi adanya kemungkinan serangan udara. Penggunaan alutsista dilaksanakan atas perintah Komando Atas.



Gambar 3. Penggunaan Meriam 57 MM S-60/T.AKT

Sumber: Dokumentasi Yonarhanudse-6/BAY, 2017.

Dalam rangka OMSP, penggunaan kekuatan satuan pada hakekatnya untuk menghadapi ancaman yang timbul dari dalam negeri dalam rangka kepentingan pertahanan negara dan mendukung kepentingan nasional. Pelaksanaannya dapat bersifat tempur maupun non tempur, sesuai dengan macam tugasnya atau permintaan dari satuan yang dibantu.

Pengerahan kekuatan satuan pada OMSP yang bersifat tempur maupun non tempur¹³ adalah dengan menyusun satuan dalam organisasi Satuan Tugas (Satgas) dengan atau tanpa menggunakan Alutsista Arhanud

pada operasi Pengamanan VVIP (Presiden dan Wapres serta Tamu Negara), operasi perbantuan kepada Pemerintah Daerah dan Operasi perbantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Operasi mengatasi aksi terorisme dan lain-lain berdasarkan pertimbangan taktis dapat menggunakan Alutsista sesuai tujuan dan sasaran serta tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi.

Yonarhanudse-6 merupakan salah satu yang memegang peranan penting untuk mendukung dan melaksanakan tugas Kodam Jaya. Sehingga Yonarhanudse-6 selain dituntut harus mampu melaksanakan tugas pertahanan udara, juga dilibatkan mampu mendukung tugas pengamanan Ibukota dan VVIP yang dilaksanakan oleh Kodam Jaya.

Tugas apapun yang dilaksanakan oleh Yonarhanudse-6 adalah berdasarkan perintah Komando Atas. Mekanisme perintah pengerahan pasukan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan hierarki yang ada dalam kemiliteran. Mekanisme penggunaan kekuatan satuan dilaksanakan setelah Kodam Jaya menerima informasi dari Sekretariat Militer Presiden tentang

¹³Mabes TNI. *Buku Petunjuk Induk OMSP*. (Jakarta: TNI AD, 2008) h.11-12

adanya kegiatan VVIP baik Presiden, Wapres maupun Tamu negara.



Gambar 4. Kegiatan Pengamanan VVIP Presiden RI-1

Sumber: Dokumentasi Yonarhanudse-6/BAY, 2017.

Pengeralahan kekuatan satuan Yonarhanudse-6 dalam rangka pelaksanaan tugas mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki satuan. dalam pengeralahan pasukan, Kodam Jaya mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh satuan, baik personel maupun materil yang digunakan. Yonarhanudse-6 dalam kesiapan operasi, secara personel masuk dalam tingkat Mantap III, sedangkan secara materil termasuk dalam kategori Mantap IV. Bidang Latihan dan Pangkalan masuk dalam kategori Mantap III. Secara umum dalam Yonarhanudse-6 dalam kategori Mantap III, artinya satuan Yonarhanudse-6 secara kesiapan operasional mampu dikerahkan untuk pelaksanaan tugas-tugas di wilayah

Kodam Jaya. Walaupun masih terdapat kekurangan baik secara kuantitas maupun kualitas dibidang personel dan materil.

Kondisi kekuatan personel yang dimiliki satuan saat ini masih kurang dari standar TOP yaitu 492 dari 626 orang yang seharusnya dimiliki oleh satuan. Tuntutannya, setiap saat prajurit harus selalu siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok yaitu melindungi obyek vital nasional dari ancaman serangan udara. Namun di wilayah Kodam Jaya ini prajurit banyak sekali dihadapkan dengan tugas-tugas pengamanan dan perbantuan kepada Pemerintah Daerah maupun Polda Metro Jaya, sehingga tugas pokok sesuai fungsi Arhanud menjadi relatif tidak berjalan. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENIS PENUGASAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6
1	BP Satpamwal Mabas TNI	1	-	-	-
2	Jaga Mabasad	1	1	1	1
3	Jaga Komplek Pati	1	-	-	1
4	Jaga Gupusjat Cakung	-	-	-	1
5	Ops Pam KTT OKI	1	-	-	-
6	Ops Pam KTT WIFE	-	1	-	-
7	Ops Pam VVIP RI 1 dan RI 2 beserta Keluarga	25	27	30	34
8	Ops Pam VVIP Tamu Negara Setingkat Kepala Negara	4	3	3	-

9	Pam Unjuk Rasa Aksi Bela Islam I, II dan III	-	-	-	3
10	Pam Tahun Baru 2017	-	-	-	1

Tabel 1. Penugasan Yonarhanudse-6/BAY selama TA. 2016

Sumber: Laporan Progja bidang Operasi Yonarhanudse-6/BAY, 2016

Hal-Hal yang Mempengaruhi

Implementasi kebijakan penggunaan kekuatan satuan Yonarhanudse-6 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya:

Pertama, komunikasi yang merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Batalyon Arhanudse-6/BAY. Dimensi komunikasi ini sangat ditentukan dari beberapa aspek yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Unsur komunikasi ini terdiri atas komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi internal terjadi antar pejabat Batalyon yang terdiri atas pejabat Danyon dan Perwira Staf Ops dengan Pejabat Danrai dan Bintara pelatih serta prajurit. Kegiatan tersebut dalam upaya agar pelaksana tugas dapat memahami tujuan dan sasaran tugas

yang diberikan. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non formal seperti pemberian perintah langsung atasan terhadap bawahan.

Komunikasi eksternal terjadi di antara pejabat Danyon dan Pasiops dengan Komando Atas maupun instansi terkait kegiatan yang dilaksanakan. Komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan penggunaan kekuatan dapat tercapai.

Dari hasil komunikasi ini dapat diketahui bahwa intensitas penggunaan kekuatan Yonarhanudse-6/BAY sebagai satuan yang memiliki fungsi militer umum Arhanud di wilayah Ibukota jarang sekali digunakan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka perlindungan terhadap ancaman serangan udara.

Faktor kedua adalah Sumber daya. Dimensi sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh implementator. Terkait dengan faktor

pertama, perintah-perintah cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi kebijakan penggunaan kekuatan kekurangan sumber daya pendukung, diantaranya sumber daya manusia dan fasilitas atau sarana prasarana.

Sesuai dengan tabel organisasi dan perlengkapan (TOP) Yonarhanudse-6 masih terdapat kekurangan personel yaitu Perwira 4 orang, Bintara 10 orang, dan Tamtama 98 orang, dengan jumlah kekurangan seluruhnya 112 orang. Satuan juga hanya memiliki 15 unit kendaraan penarik meriam dari 77 unit yang seharusnya, sehingga praktis hanya bisa mendukung kegiatan tugas untuk 1 Baterai.

Dari kondisi tersebut, tugas satuan yang dilaksanakan cenderung menjadi tidak optimal. Prajurit yang melaksanakan latihan dan tugas harus bergantian sehingga waktu menjadi tidak efektif. Daerah gelar meriam yang digunakan untuk tugas pertahanan udara pun sudah banyak yang tergusur oleh pembangunan gedung-gedung dan perumahan, karena telah menjadi daerah pemukiman dan daerah industri. Sehingga tentu saja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok.

Ketiga, disposisi yang terkait dengan sikap satuan bawah dan prajurit dalam melaksanakan kebijakan yang telah diperintahkan. Menurut Edward III, kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan dengan tujuan yang diharapkan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Menurut hasil penelitian, Perwira staf dan Komandan Baterai selaku perwira bawahan mampu merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan dengan baik kegiatan penggunaan kekuatan sesuai alokasi waktu yang ditentukan. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tugas menjadi tidak optimal, contohnya seperti kondisi jumlah personel maupun kendaraan yang digunakan.

Tuntutan tugas dari Komando atas tinggi, sehingga tuntutan tugas kepada satuan bawah juga tinggi. Apabila satuan tidak mampu untuk mendukung tugas, satuan akan berkoordinasi dengan satuan atas yang memberikan perintah dan juga berkoordinasi dengan satuan samping, sehingga satuan tetap mendukung tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan batas kemampuan.

Terkait dengan sikap prajurit, secara umum aktif dan semangat untuk melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan sesuai dengan mekanisme tugas yang telah direncanakan. Prajurit selalu siap untuk digerakkan untuk melaksanakan tugas-tugas baik dalam rangka pertahanan udara maupun tugas-tugas lainnya.

Faktor keempat yaitu struktur birokrasi. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas, satuan telah membuat organisasi bentukan sesuai dengan tuntutan tugas yang harus dilaksanakan. Untuk mengatasi kekurangan pasukan, satuan membuat prioritas tugas untuk mendukung tugas secara optimal. Walaupun satuan ini sudah memiliki organisasi sesuai

TOP, namun untuk melaksanakan tugas yang banyak, satuan perlu mengorganisir kembali satuan sesuai dengan tugas yang dibebankan.

Berdasarkan hasil wawancara, pada pelaksanaan kebijakan penggunaan kekuatan, Batalyon melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang sesuai manajemen penugasan. Kegiatan pelaksanaan penggunaan kekuatan secara garis besar dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya Prosedur Tetap dalam pelaksanaan tugas, produk-produk rencana dan laporan pelaksanaan tugas yang merupakan pedoman dalam penugasan di satuan.

KESIMPULAN SARAN

Kesimpulan.

Kebijakan penggunaan satuan Arhanud seperti Batalyon Arhanudse-6/BAY merupakan bagian integral dari penggunaan TNI AD yang merupakan strategi militer, dimana dalam implementasinya dilaksanakan baik dalam rangka OMP maupun OMSP. Implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY

dalam rangka pencapaian tugas pokok dinilai belum optimal digunakan sesuai dengan fungsi pertahanan udara, baik dalam rangka OMP maupun OMSP. Sehingga penggunaan kekuatan satuan Yonarhanudse-6 lebih menonjolkan pada kekuatan personel dan senjata perorangannya daripada penggunaan alutsista Arhanud dengan meriam 57 mm S-60/T.AKT. Hal ini tentu saja sangat bergantung atas perintah dari komando atas dan juga pertimbangan jenis dan eskalasi ancaman yang dihadapi. Sehingga penggunaan kekuatan Yonarhanudse-6 tetap proporsional dan tepat sasaran sesuai tugas pokok yang harus dicapai. Namun disisi lain dapat memberikan dampak cukup signifikan dalam hal kesiapan satuan apabila dihadapkan pada kemungkinan ancaman udara musuh yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penggunaan kekuatan Batalyon Arhanudse-6/BAY dalam rangka pencapaian tugas pokok. Pertama, yaitu dimensi komunikasi yang sangat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi. Aspek dari komunikasi ini

berupa keputusan-keputusan, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Kedua, satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya membutuhkan sumber daya prajurit yang cukup dan mampu untuk menguasai di bidangnya. Sumber daya non manusia juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Hal ketiga yang mempengaruhi kebijakan penggunaan kekuatan lainnya ialah dimensi disposisi. Disposisi ini berkaitan dengan sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Yang terakhir ialah dimensi struktur birokrasi ini yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Satuan telah menjalankan kegiatan sesuai dengan mekanisme standar prosedur yang sesuai teknik penyelenggaraan tugas yang telah ditentukan oleh sturuktur organisasi.

Saran.

Sejalan dengan pergeseran paradigma perang, negara-negara maju telah merumuskan aktivitas perang pada beberapa strata yang saling terkait dan terbentuk dalam hierarkhis. Namun sampai dengan

sekarang belum ada definisi ilmiah yang diakui oleh para ahli terkini untuk mengembangkan ilmu strategi militer yang dapat diakui secara universal sebagai suatu keilmuan.

Sehingga secara teoritis, disarankan perlu ada penelitian lebih lanjut tentang pengembangan strategi militer, untuk menganalisis penggunaan kekuatan militer di Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan tugas pokok yang amanatkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004.

Selanjutnya, secara praktis kepada satuan Yonarhanudse-6/BAY disarankan perlu penambahan materiil atau rematerialisasi alutsista agar mampu mengimplementasikan tugas-tugas yang diberikan di wilayah kodam Jaya/Jayakarta. Selain itu perlu juga penambahan jumlah personil yang ada sesuai dengan TOP agar secara kuantitas dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dale Yoder. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Erlangga
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Edwards III. 1980. Implementing Public Policy. Texas : Congressional Quartely Press
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Trio Rimba Persada.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. Strategi Pertahanan Negara. Jakarta
- Komariah, Aan dan Djam'an, Satori. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

- Mabesad. 2013. Doktrin TNI Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi”, Jakarta: TNI AD
- Mabes TNI. 2012. Doktrin Tri Dharma Eka Karma, Jakarta: TNI AD.
- Mabes TNI. 2008. Buku Petunjuk Induk OMP, Jakarta: TNI AD.
- Mabes TNI. 2008. Buku Petunjuk Induk OMSP, Jakarta: TNI AD.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source Book or. New Methods.* Beverly Hills
- Moekijat, Drs. 1998. *Perencanaan Sumber Daya Manusia.* Bandung : Mandar Maju
- Salusu J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.* Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Alfabeta
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan.* Jakarta : Media Pressindo
- Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan

- Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Nomor 22